

**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN
PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD
TERHADAP PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Boalemo)**

Oleh

**INDRAWATI MAKUTA
E1118092**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar sarjana**



**PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN
PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD
TERHADAP PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Boalemo)**

Oleh

**INDRAWATI MAKUTA
E1118092**

SKRIPSI

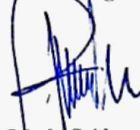
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dan telah
Disetujui oleh Tim Pembimbing
Kamis, 02 Juni 2022

Pembimbing I



Revther Biki, SE, M.Si
NIDN : 0927077001

Pembimbing II



Parmin Ishak, S.Akun., M.Ak
NIDN : 0919099202

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PERSONAL *BACKGROUND* DAN
PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD
TERHADAP PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH

OLEH :

INDRAWATI MAKUTA

E1118092

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Bala Bakri, SE.,S.Ip.,S.Psi.,MM
(Ketua Penguji)
2. Melinda Ibrahim,SE.,M.SA
(Anggota Penguji)
3. Nur Lazimatul Hilma Sholehah,S.Akun.,M.Ak:.....
(Anggota Penguji)
4. Reyther Biki.,SE.M.Si
(Pembimbing Utama)
5. Parmin Ishak,S.Akun.,M.Ak
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Hasil ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ihsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



INDRAWATI MAKUTA
E1118092

Motto & Persembahan

Sesungguhnya *bersama kesukaran itu ada kemudahan.*

Karena itu *bila kau telah selesai (Mengerjakan yang lain) dan kepada*

Tuhan, Berharaplah

(QS Al-Insyirah : 6-8)

Jiwa pengabdian adalah jiwa yang mampu bersyukur atas semua pemberian oleh yang Maha Kuasa, Ikhlas dalam menerima segala konsekuensi hidup, berdoa dan berusaha untuk mencapai yang terbaik, serta berikrar untuk mempertahankan segala kebajikan hidup..
(M. Nida' Fadlan)

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Muhammad SAW Utusan Allah Sebagai Penyempurna Akhlak

Kedua Orang Tua (**Amir Makuta dan Misra Rivai**) yang tidak henti-hentinya memberikan kasih dan cinta.

Kakak dan adik **Listrianti Makuta, Masriyanto Makuta, Sahrul makuta, Mutia Al-Fauziah Makuta** yang sama semangatnya mendukung saya mengejar cita-cita.

Buat Pembimbing serta dosen-dosen yang membimbing saya, dan telah banyak memberi ilmu pengetahuan sehingga dapat merubah saya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak dapat di sebutkan satu persatu terima kasih atas support, semangat do'a dan saranya dalam penyusunan skripsi ini.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT SAYA MENIMBAH ILMU**

2022

ABSTRACT

INDRAWATI MAKUTA. E1118092. THE INFLUENCE OF PERSONAL BACKGROUND AND REGULATION UNDERSTANDING OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE ASSEMBLY MEMBERS ON THE REGIONAL FINANCIAL SUPERVISION

This study aims to determine the extent of influence of Personal Background and Regulation Understanding of the Regional People's Representative Assembly members on the Regional Financial Supervision at the Regional People's Representative Assembly of Boalemo Regency. The study uses a quantitative research method. The population in this study covers all of the Regional People's Representative Assembly members of the Boalemo Regency. It takes samples from the Regional People's Representative Assembly members of Boalemo Regency, namely 25 respondents. It applies a questionnaire as the primary data collection tool. The results of this study indicate that Personal Background with a significant level of 0.029 and Regulatory Understanding with a significance level of 0.000 has a positive and significant effect on regional financial supervision. Keywords: personal background, regulation understanding, regional financial supervision

ABSTRAK

INDRAWATI MAKUTA. E1118092. PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Personal Background* dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada DPRD Kabupaten Boalemo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, penelitian ini mengambil sampel dari anggota DPRD Kabupaten Boalemo dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama atau primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Boalemo. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 25 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Personal Background* dengan tingkat signifikan sebesar 0,029 dan Pemahaman Regulasi dengan nilai signifikan 0,000 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Kata kunci: *personal background*, pemahaman regulasi, pengawasan keuangan daerah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr,wb

Subhanallah, Walhamdulillah, Walaailahailallah, Wallahuakbaar, Wala haula wala Quwwata illaa billahil aliyil adjim.

Segala Puji kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH”. Usulan Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Si.,C.Sr selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dr. Musafir, SE.,M.Si, Ibu Melinda Ibrahim, SE.,M.SA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Reyther Biki, SE.,M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, koreksi serta mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini. Bapak Parmin Ishak, S.Akun.,M.Ak selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, koreksi serta mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini, Bapak Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini,

ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang telah mendukung penulis, dan semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman seperjuangan akuntansi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Sebagai manusia yang berusaha untuk menjauhi sikap takabur, penulis perlu sampaikan bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik penulis harapkan dari para pembaca untuk menyempurnakan di kemudian hari. Semuanya akan diterima dengan senang hati dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga skripsi ini bermanfaat dan mendatangkan pahala serta ridlaNya pada kita semua sebagai suatu pengabdian untuk umat manusia. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Gorontalo,

2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRAK</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian.....	6
1.3.2. Tujuan Peneliti	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya.....	7
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Pustaka	8
2.1.1. Definisi Keuangan Daerah	8
2.1.2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	9
2.1.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	10
2.1.3.1. Definisi DPRD	10
2.1.3.2. Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	10
2.1.3.3. Fungsi DPRD	11
2.1.4. Personal Background Anggota DPRD.....	12
2.1.5. Pemahaman Regulasi Anggota DPRD.....	13
2.1.6. Pengawasan APBD Oleh DPRD.....	14
2.1.6.1. Definisi Pengawasan APBD	14
2.1.6.2. Kinerja DPRD Dalam Pengawasan APBD ..	16
2.1.6.3. Fungsi Pengawasan APBD	17
2.1.6.4. Tujuan Pengawasan APBD.....	18

2.1.6.5. Indikator Pengawasan APBD	19
2.2. Penelitian Terdahulu	21
2.3. Kerangka Pemikiran	22
2.4. Hipotesis Penelitian	23
BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian.....	25
3.2. Metode Penelitian	25
3.2.1. Metode yang Digunakan	25
3.2.2. Operasional Variabel penelitian.....	26
3.2.3. Populasi dan Sampel Penelitian	28
3.2.3.1 Populasi Penelitian.....	28
3.2.3.2 Sampel Penelitian	29
3.2.4. Jenis dan Sumber Data	30
3.2.4.1. Jenis Data	30
3.2.4.2. Sumber Data	31
3.2.5. Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.5.1. Penelitian Lapangan	31
3.2.5.2. Penelitian Kepustakaan	32
3.2.6. Prosedur Pengujian dan Instrumen Penelitian	32
3.2.6.1. Analisis Instrumen Penelitian	32
3.2.6.2. Uji Validitas	33
3.2.6.3. Uji Reliabilitas	33
3.2.6.4. Konversi Data	33
3.2.6.5. Uji Asumsi Klasik	34
3.2.7. Rancangan Uji Hipotesis	35
3.2.7.1. Model/Gambar	35
3.2.7.2. Langkah-Langkah Pengujian Hipotesis	36
3.2.7.3. Sistem Pengolahan Data dengan Komputer.	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1. Sejarah Umum Kantor DPRD Kabupaten Boalemo..	40
4.1.2. Visi Misi DPRD kabupaten Boalemo	40
4.1.3. Profil DPRD Kabupaten Boalemo	41
4.1.3.1. Letak Bangunan	41
4.1.3.2. Klasifikasi Ruangan	41
4.1.3.3. Daerah Pemeliharaan Anggota DPRD	42
4.1.4. Struktur DPRD KaBupaten Boalemo	43
4.1.5. Tugas Pokok Anggota DPRD Kabupaten Boalemo	43
4.2. Hasil Penelitan	44
4.2.1. Deskprisi Objek Penelitian.....	44

4.2.1.1.	Gambaran Umum Responden	44
4.2.1.2.	Karakteristik Responden	45
4.3.	Hasil Instrumen Penelitian	47
4.3.1.	Hasil Uji Statistik Deskriptif	47
4.3.2.	Hasil Uji Kualitas Data	53
4.3.2.1.	Hasil Uji Validitas	53
4.3.2.2.	Hasil Uji Reliabilitas	56
4.3.3.	Hasil Uji Normalitas	57
4.4.	Hasil Uji Hipotesis	59
4.5.	Pembahasan Hasil Penelitian	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan	67
5.2	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian	23
Gambar 3.1. Struktur Analisis Regresi	35
Gambar 4.1. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Boalemo	43
Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas.....	57
Gambar 4.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1. Operasional Variabel Dependen	26
Tabel 3.2. Operasional Variabel Independen.....	27
Tabel 3.3. Bobot Nilai Variabel	28
Tabel 3.4. Populasi	29
Tabel 3.5. Sampel	30
Tabel 4.1. Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner.....	46
Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden	47
Tabel 4.3. Pendidikan Terakhir Responden	47
Tabel 4.4. Skala Penelitian Jawaban Responden	48
Tabel 4.5. Tanggapan Responden mengenai <i>Personal Background</i> (X1) .	49
Tabel 4.6. Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Regulasi (X2)..	51
Tabel 4.7. Tanggapan Responden Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	53
Tabel 4.8. Hasil Uji Validasi <i>Personal Background</i> (X1)	55
Tabel 4.9. Hasil Uji Validasi Pemahaman Regulasi (X2).....	56
Tabel 4.10. Hasil Uji Validasi Pengawasan Keuangan Daerah (Y).....	56
Tabel 4.11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Bebas dan Variabel Terikat	57
Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinieritas	59
Tabel 4.13. Model Persamaan Regresi.....	60
Tabel 4.14. Hasil Uji R^2	62
Tabel 4.15. Uji F	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian	73
Lampiran 2: Deskriptif Variabel Penelitian	77
Lampiran 3: Uji Validitas dan Uji Reabilitas	82
Lampiran 4: Analisis Data dan Uji Hipotesis	91
Lampiran 5: Tabulasi Data, Data Ordinaln dan Konversi ke Internal	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa distribusi dan penggunaan sumber daya alam negara dapat dilakukan secara menyeluruh, dan untuk mencapai keseimbangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya diawasi oleh pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tanggung jawab sosial, pengelolaan keuangan daerah harus memiliki komponen utama, dan pemerintah daerah harus mewujudkan dan menaatinya, yaitu pengelolaan keuangan daerah (APBD) secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Undang-undang ini mengubah akuntabilitas pemerintah daerah dari akuntabilitas vertikal yaitu kepada pemerintah pusat menjadi akuntabilitas horizontal yaitu kepada masyarakat melalui DPRD, sehingga tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih jelas. Disahkannya UU Otonomi Daerah dan Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan Pengawasan

Keuangan Daerah juga berdampak positif terhadap status, fungsi dan hak DPRD. Anggota DPRD akan lebih aktif memperjuangkan tuntutan masyarakat. Selain dari itu, otonomi daerah merupakan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur sendiri hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu tahapan organisasi dalam melaksanakan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terlaksananya visi dan misi organisasi (Fahmi, 2014 : 138).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa DPRD memiliki tugas yang sangat besar dalam mengawasi keuangan daerah dan memiliki nilai strategis yang sangat penting, yaitu dapat mengawasi kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Meskipun pada kenyataannya masih banyak permasalahan dan kelemahan yang terjadi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif. Hal ini mengakibatkan rencana kerja yang direncanakan tidak sejalan dengan prioritas dan kepentingan daerah.

Pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh sistem individu secara pribadi. Setiap individu memiliki latar belakang pribadi dan pemahaman regulasi yang berbeda-beda dan ini

dapat mempengaruhi tugas dan fungsi sebagai anggota dewan. Kelemahan yang terjadi atas pengawasan keuangan daerah karena lemahnya sistem politik maupun individunya sebagai pelaku politik.

Latar belakang personal merupakan latar belakang yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman di DPRD, dan pelatihan tentang keuangan daerah. Latar belakang personal berkaitan erat dengan sumber daya manusia setiap individu. Sumber daya manusia menjadi pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi, sehingga harus dipastikan sumber daya manusia ini dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Jika pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan secara optimal, maka pelayanan dan kualitas kerja dari anggota dewan juga akan lebih baik.

Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah dan lain-lain (Nuraini, 2017:40). Pemahaman regulasi menjadi pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk mengembangkan kinerja dalam dalam pengelolaan keuangan daerah, DPRD harus mendominasi semua bagian untuk menilai kemampuan eksekutif, karena daerah belum sepenuhnya melaksanakan rencana keuangan

dengan tanda-tanda pencapaian yang jelas. Dengan demikian, informasi tentang keuangan, pembukuan dan pengelolaan rencana belanja daerah harus didominasi oleh anggota DPRD.

Selain itu anggota dewan juga harus mengetahui kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti halnya pemahaman dewan tentang Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Dewi Kartika Sari (2012) yaitu tentang Pengaruh personal *background*, *political background*, pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali) yang menyatakan bahwa Penelitian ini menemukan bahwa : 1) *Personal background* dengan indikator tingkat pendidikan dan bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, kemudian indikator latar belakang pekerjaan dan pengalaman di DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 2) *Politic Background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 3) Pemahaman

regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Boalemo khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo bahwa yang menjadi permasalahan yang di alami yaitu lemahnya kontrol DPRD terhadap kebijakan keuangan daerah dan pemahaman DPRD yang masih kurang terhadap optimalisasi penganggaran yang menyebabkan perencanaan yang tidak optimal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji **Pengaruh *Personal Background* dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD Terhadap Pengawasan keuangan daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boalemo).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah yang akan diteliti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *personal background* dan pemahaman regulasi anggota DPRD berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah di kabupaten Boalemo?
2. Bagaimana pengaruh *personal background* terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo.
3. Bagaimana pengaruh pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah di kabupaten Boalemo?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja anggota dewan dalam hal pengawasan anggaran di Kabupaten Boalemo.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana *personal background* dan pemahaman regulasi anggota DPRD berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah di kabupaten Boalemo.
2. Untuk mengetahui bagaimana *personal background* berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah di kabupaten Boalemo.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman regulasi anggota DPRD berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dapat dijadikan sebagai tambahan bacaan dalam bidang akuntansi sektor publik (ASP) di Indonesia, terutama dalam hal yang berhubungan dengan pengawasan keuangan daerah.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya yang sejenis dengan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diinginkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana peran DPRD dalam melaksanakan tugas pengawasan keuangan daerah dan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja DPRD.
- b. Bagi DPRD, sebagai masukan dan dukungan terhadap DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu pengawasan, khususnya dalam pengawasan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik.
- c. Bagi partai politik, dapat dijadikan sebagai masukan dan sebagai acuan dalam merekrut anggota dewan dari masing-masing partai politik serta untuk mengembangkan kader partai politik.

1.4.3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi mengenai pengaruh latar belakang personal dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1.Kajian Pustaka

2.1.1. Definisi Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah pengelolaan segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Hak dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kuswandi (2016) berpendapat bahwa keuangan daerah mengacu pada semua hak dan kewajiban daerah yang dapat diukur dengan uang, serta segala bentuk berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah, serta pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 (Pasal 3) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dalam

suatu sistem yang teratur kemudian diakui dalam APBD tahunan dan dikendalikan dengan pedoman wilayah.

2.1.2. Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Permendagri No. 33 Tahun 2017, tentang prinsip penyusunan APBD tahun 2018:

1. Sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan daerah.
2. Teroganisir, terikat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab, menjunjung tinggi rasa keadilan dan konsistensi serta bermanfaat bagi masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat umum dalam memahami APBD dan menerima informasi yang selengkap-lengkapny.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, hukum dan pedoman yang lebih tinggi lainnya.

2.1.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2.1.3.1. Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berada di kabupaten/kota sebagai komponen pelaksanaan pemerintahan daerah ditingkat daerah diseluruh Indonesia (Wikipedia, 2017).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

2.1.3.2. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 (Pasal 375) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa perangkat DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pimpinan
2. Badan musyawarah
3. Komisi
4. Badan Legislasi Daerah
5. Badan anggaran
6. Badan kehormatan
7. Perangkat lain yang dibutuhkan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

2.1.3.3. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai lembaga legislatif daerah, fungsi DPRD sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi antara lain:

a. Fungsi Legislasi

Fungsi Legislasi yaitu fungsi DPRD membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama-sama kepala Daerah. Pembentukan peraturan daerah tersebut merupakan proses perumusan kebijakan publik, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan bersifat formal untuk mengatur jalannya suatu sistem pemerintah daerah yang baik, maka substansi dari peraturan daerah ini memuat semua peraturan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat terkait dengan hal-hal yang diatur.

Hal ini sesuai dengan latar belakang DPRD, dimana DPRD adalah wakil rakyat yang mampu menampung aspirasi rakyat dan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi rakyat tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga peraturan-peraturan yang disusun tersebut harus mementingkan kepentingan masyarakat.

b. Fungsi pengawasan

Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah), apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Dewi, 2011).

c. Fungsi anggaran

Fungsi anggaran merupakan proses perhitungan, penyusunan dan penetapan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam proses penganggaran ini, DPRD mempunyai fungsi yang sangat besar. DPRD harus bertindak secara aktif, proaktif dan selektif, karena DPRD menjadi legitimator Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disebut dengan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah supaya menjadi APBD yang sah.

2.1.4. *Personal Background Anggota DPRD*

Latar Belakang Personal berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia seorang individu yang menjadi ujung tonggak sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007). Setiap anggota dewan yang terpilih memiliki Latar Belakang Personal yang tidak sama sebelum terpilih menjadi anggota DPRD. Dengan mengetahui lebih dalam tentang Latar Belakang Personal anggota dewan akan membantu mengevaluasi persentasi kinerja para anggota dewan dalam mewujudkan kewajiban dan kapasitasnya.

Dalam pendekatan *behaviorisme*, individu adalah yang dipandang benar-benar melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga

politik pada dasarnya adalah perilaku individu dengan pola tertentu. Dengan demikian, untuk memperjelas suatu lembaga yang harus diperhatikan bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga (Winarna dan Murni, 2007).

Latar Belakang Personal adalah latar belakang yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Latar belakang ini dapat mencerminkan kualitas seorang individu. Adanya latar belakang personal yang berbeda diantara para anggota dewan sedikit banyak akan memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dalam penelitian ini latar belakang personal tersebut memiliki beberapa indikator antara lain:

- a. Latar Belakang Pendidikan
- b. Pengalaman Organisasi
- c. Pengalaman di DPRD
- d. Pelatihan tentang keuangan daerah

2.1.5. Pemahaman Regulasi Anggota DPRD

Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah dan lain-lain (Nuraini, 2017:40). Pemahaman regulasi menjadi pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien.

Adanya peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya

dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ketika sedang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran, anggota dewan sekurang-kurangnya harus mengetahui undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran. Sehingga anggota dewan dapat mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan perundangan yang ditetapkan.

2.1.6. Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh DPRD

2.1.6.1. Definisi Pengawasan APBD

Pengawasan Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan dengan efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal I ayat (6) menyebutkan, bahwa : “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Rahayu Relawati (2012 : 107), pengawasan adalah bagian terakhir dari fungsi-fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses

evaluasi oleh manajer untuk mendapatkan apakah implementasi dari rencana kegiatan sudah konsisten dan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Kemudian menurut Mondy, R.W dalam Abbdul Jalaludin Sayuti (2013 : 118) pengawasan adalah proses membandingkan hasil yang dicapai dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Menurut Irham Fahmi (2014 : 138) beliau mengemukakan secara umum pengertian pengawasan adalah sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi suatu organisasi.

Pengawasan mengacu pada cara yang dilaksanakan oleh pihak di luar pemerintahan daerah dalam hal ini bagian eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD untuk turut mengawasi kinerja pemerintah (Pramita dan Andriyani, 2010). Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD provinsi/kabupaten/kota. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, Pelaksanaan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD.

2.1.6.2. Kinerja DPRD Dalam Pengawasan APBD

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kinerja adalah suatu hasil dari suatu kegiatan atau program yang sedang atau telah dicapai dalam penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Sari (2010) menjelaskan bahwa kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah merupakan hasil kegiatan atau rencana yang diperoleh anggota dewan dalam penyusunan APBD berdasarkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuannya dalam melakukan pengawasan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa:

- a. Pengawasan anggaran dilakukan oleh dewan.
- b. Dewan memiliki kekuasaan untuk memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Anggota dewan yang baru terpilih dapat melakukan beberapa hal dalam fungsi pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD (Haryani, 2011).

- a. Pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD, dalam hal ini DPRD dapat mengundang aparatur di lingkungan pemerintah daerah untuk dimintai keterangan, pendapat dan saran.

- b. Mengadakan rapat kerja komisi-komisi DPRD dengan eksekutif yang diwakili oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Dalam hal ini DPRD dapat membicarakan berbagai persoalan dengan pemerintah. Baik mengenai anggaran maupun kebijakan lainnya.
- c. Rapat pembahasan anggaran.
- d. Melakukan kunjungan kerja baik ke pemerintah daerah maupun ke kabupaten/kota di provinsi lain. Hasil kunjungan kerja dapat dijadikan bahan pembelajaran anggota dewan dalam menjalankan tugasnya..

Menurut Haryani (2011), anggota DPRD perlu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pengawasan keuangan daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Indikator kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah:

- a. Anggota DPRD terlibat dalam penyusunan APBD dan kebijakan umum.
- b. Menganalisis proses penyusunan anggaran.
- c. Ikut serta dalam pengesahan APBD.
- d. Memahami transparansi APBD.
- e. Memantau pelaksanaan APBD.
- f. Mengusut dan menindaklanjuti jika terjadi kejanggalan dalam APBD.

2.1.6.3. Fungsi Pengawasan APBD

Menurut Rahayu Relawati (2012 : 111) fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan.

- b. Memonitor pelaksanaannya.
- c. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan.
- d. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan

Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi.

Hal ini tidak hanya memiliki pengalaman di bidang sosial dan politik, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan terkait dengan tugas-tugas badan legislatif yang menjadi tanggung jawabnya, Yudoyono dalam Utami dan Syofyan (2013).

Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD berhak mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, memberikan pendapat, dan melakukan penyelidikan.

- a. Hak anggaran
- b. Hak meminta keterangan
- c. Hak mengadakan perubahan
- d. Hak mengajukan pernyataan pendapat

2.1.6.4. Tujuan Pengawasan APBD

Menurut Rahayu Relawati (2012 : 107) tujuan pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan, namun apabila penyimpangan tersebut terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan ke tujuan semula.

Tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, menjamin dipatuhinya berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dan memastikan pengelolaan keuangan daerah melakukan berbagai upaya untuk penghematan, efesiensi, dan efektifitas.

2.1.6.5. Indikator Pengawasan APBD

Indikator pengawasan keuangan daerah (Hartono, 2015) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan
2. Pengesahan
3. Pelaksanaan
4. Pertanggung Jawaban

Penjelasan dari beberapa indikator pengawasan APBD adalah tahap pertama, anggaran tersebut akan dibahas dalam Renstra (Rencana Strategis) kemudian meningkat ke RKA (Rencana Kerja Anggran), selanjutnya anggaran tersebut akan dibahas dalam rapat komisi-komisi. Dalam hal bidang pembangunan, maka anggaran tersebut di bahas di komisi C. Dalam pembahasan rapat, setelah melalui beberapa pertimbangan, anggaran yang diajukan oleh pemerintah ada yang disetujui dan ada yang tidak disetujui.

Tahap kedua yaitu, apabila anggaran disetujui oleh DPRD, maka anggaran tersebut akan disahkan dalam sidang paripurna dan akan menjadi sebuah ketetapan.

Tahap ketiga, pengawasan DPRD dalam tahap pelaksanaan APBD yaitu bahwa pengawasan tersebut dilakukan oleh DPRD setelah adanya ketetapan APBD dalam sidang paripurna yang telah disetujui. Sebagai pelaksana APBD tersebut adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) masing-masing. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan efektif, maka harus memiliki pedoman-pedoman kerja DPRD khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Tahap terakhir dalam indikator pelaksanaan pengawasan APBD ini yaitu pengawasan dalam hal pertanggung jawaban pemerintah daerah pada APBD. Dimana pengawasan bisa dilaksanakan secara langsung dengan menyidak di lapangan apakah pembangunan sudah sesuai dengan yang direncanakan baik kualitas maupun kuantitas dan lain-lain. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui hasil laporan pertanggungjawaban. Dari laporan pertanggungjawaban tersebut akan diketahui apakah anggaran tersebut habis dalam satu tahun anggaran ataukah masih ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

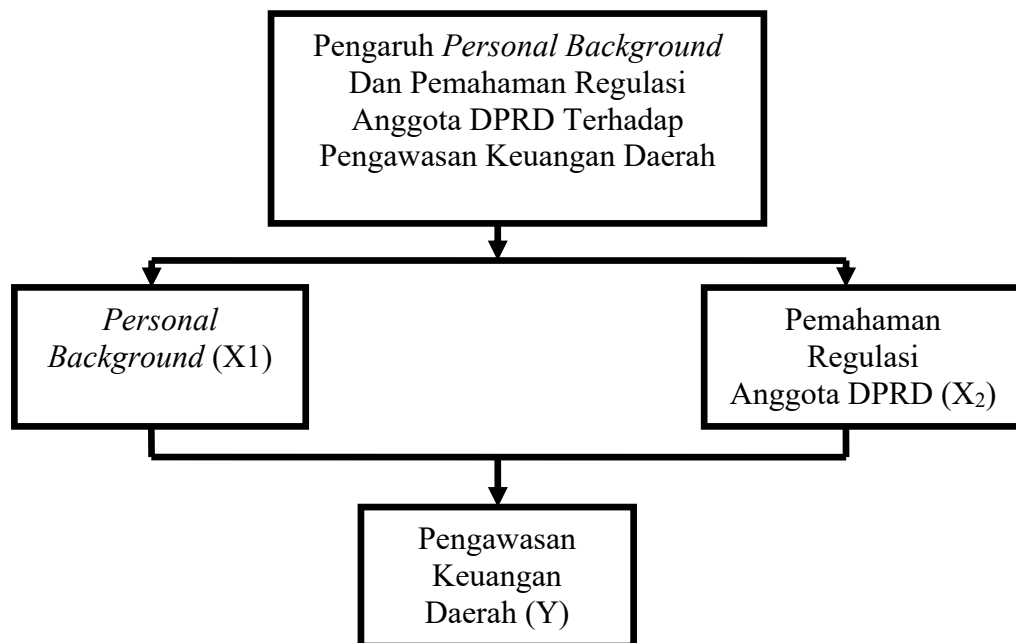
No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Sherly Dwi Cipta, Zul Amar,	Pengaruh Partisipasi Masyarakat,	Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat, personal <i>background</i> , latar belakang politik,

	Rina Andriani 2020	Personal <i>Background</i> , Latar Belakang Politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	dan pemahaman regulasi anggota DPRD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.	Dewi Kartika Sari (2012)	Pengaruh personal <i>background</i> , <i>political background</i> , pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)	Penelitian ini menemukan bahwa : 1. Personal <i>background</i> dengan indikator tingkat pendidikan dan bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, kemudian indikator latar belakang pekerjaan dan pengalaman di DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 2. <i>Politic Background</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 3. Pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
3.	Mariyos Alam Fajisra dan Popi Fauziati (2017)	Pengaruh <i>personal background</i> , <i>political background</i> dan pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam	Penelitian ini mendapatkan bukti bahwa <i>Personal Background</i> dan <i>Political Background</i> tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kemudian pemahaman regulasi berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

		pengawasan keuangan daerah (Studi kasus apda DPRD Kabupaten/Kota Sumatera Barat)	
--	--	---	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini adalah tentang pengaruh latar belakang personal dan pengetahuan anggota dewan terhadap peran DPRD dalam pengawasan anggaran daerah. Untuk menyusun hipotesis, kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu latar personal background dan pemahaman regulasi, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori dan merupakan jawaban sementara terhadap pemecahan masalah yang dihadapi serta harus dibuktikan kebenaran hasilnya, Arfan Ikhsan (2014 : 241). Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka penelitian tersebut, maka hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : *Personal background* dan pemahaman regulasi anggota DPRD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo.

H₂ : *Personal background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo.

H₃ : Pemahaman regulasi anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka ideologis yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh *personal background* dan pemahaman regulasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Metode yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang didasarkan pada filosofi positivis, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, metode penelitian dalam bentuk digital, dan penggunaan statistik untuk analisis.

Meskipun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei, penelitian survei digunakan untuk menjelaskan kausalitas dan menguji hipotesis. Penelitian ini mengambil sampel dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama atau primer.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk mengubah variabel penelitian menjadi konsep dimensi, indikator, dan skala yang bertujuan untuk mendapatkan nilai variabel lain. Selain itu, tujuannya untuk mendorong pemahaman dan menghindari perbedaan konseptual dalam penelitian ini. Berikut pengoperasian variabel-variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3.1.
OPERASIONAL VARIABEL X

Variabel	Indikator	Skala
<i>PersonL Background</i> (X1)	a. Latar belakang pendidikan b. Pengalaman Organisasi c. Pengalaman di DPRD d. Pelatihan tentang keuangan daerah	Ordinal
Pemahaman Regulasi (X2)	a. DPRD berperan penting dalam proses pembahasan dan penetapan regulasi DPRD. b. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh masing-masing OPD. c. DPRD harus mematuhi tata tertib. d. DPRD melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tentang APBD .	Ordinal

Sumber : Siti Amalia (2015)

TABEL 3.2.
OPERASIONAL VARIABEL Y

Variabel	Indikator	Skala
Pengawasan keuangan daerah (Y)	<ul style="list-style-type: none"> a. Anggota DPRD terlibat dalam memberikan masukan saat perencanaan dan penetapan kebijakan umum APBD. b. Anggota dewan berperan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD. c. Anggota DPRD terlibat dalam pengesahan APBD. d. Anggota DPRD dapat menjelaskan APBD yang telah disahkan. e. Anggota DPRD dalam memantau pelaksanaan APBD. f. Anggota DPRD aktif melakukan evaluasi terhadap LPJ APBD yang disusun oleh pemerintah (eksekutif). g. Anggota DPRD meminta keterangan terkait LPJ APBD yang disampaikan oleh pemerintah (eksekutif). h. Anggota DPRD mengusut serta menindaklanjuti apabila terjadi kejanggalaan LPJ APBD 	Ordinal

Sumber : Hartono (2015)

Saat pengujian, setiap variabel akan diukur menggunakan skala likert. Teknologi skala likert yang digunakan dalam penelitian memberikan skor pada item jawaban, dan setiap item dinilai untuk jawaban atas pertanyaan yang dirujuk oleh narasumber dalam penelitian ini (Sugiyono, 2010), dan setiap jawaban yang menggunakan alat skala likert Semua mengalami perubahan secara bertahap. dari positif ke negatif, yang bisa

berupa kata-kata. Siapkan kuesioner dengan menyiapkan 5 (lima) pilihan, yaitu: sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap pilihan akan diberi nilai bobot yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Bobot nilai variabel

Pilihan	Bobot
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

3.2.3. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.3.1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah yang digeneralisasikan yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu, dan wilayah tersebut ditentukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, populasinya tidak hanya ditentukan oleh manusia, tetapi juga meliputi benda dan benda alam lainnya. Populasi bukan hanya jumlah yang ada pada objek atau subjek yang diteliti, tetapi juga mencakup semua ciri / ciri dari objek atau objek yang diteliti.

Maka populasi dalam penelitian ini adalah semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo berjumlah 25 orang.

Tabel 3.4
Populasi

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Koordinator Komisi	3
2	Ketua Komisi	3
3	Wakil Ketua Komisi	3
4	Sekretaris Komisi	3
5	Anggota Komisi	13
Total		25

3.2.3.2. Sampel Penelitian

Menurut penelitian Sugiyono (2015), sampel merupakan bagian dari ukuran dan karakteristik populasi. Jika populasinya besar dan tidak mungkin peneliti mengkaji segala sesuatu yang ada dalam populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diperoleh dari populasi tersebut. Kesimpulan yang dipelajari dari sampel akan diterapkan pada populasi.

Oleh karena itu, sampel yang dikumpulkan dari populasi tersebut harus benar-benar representatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *total sampling*. Menurut

penelitian Sugiyono (2014) *total sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel penelitian bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo yang berjumlah 25 orang.

Tabel 3.5 Sampel

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Koordinator Komisi	3
2	Ketua Komisi	3
3	Wakil Ketua Komisi	3
4	Sekretaris Komisi	3
5	Anggota Komisi	13
Total		25

3.2.4. Jenis dan Sumber Data

3.2.4.1. Jenis Data

Sugiyono (2012), terdiri dari dua jenis yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kuantitatif adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif adalah hasil kuesioner dengan menggunakan skala likert yang disebarkan kepada responden.
2. Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan data bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat, keadaan serta gambaran suatu objek. Dalam

penelitian ini, data kualitatif adalah kondisi instansi pemerintahan atau profil instansi pemerintahan.

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif dengan menggunakan data bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dengan hasil kuesioner yang didapat dengan menggunakan skala likert yang telah dibagikan kepada responden.

3.2.4.2. Sumber Data

Sugiyono (2012), sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci, Indiantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010 : 79)

Dalam penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Boalemo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya jenis data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik

biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data, Moechar (2002 : 113).

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak terpublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari Kantor DPRD Kabupaten Boalemo dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.5. Teknik Pengumpulan Data

3.2.5.1. Penelitian Lapangan

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data asli dan data pembantu, untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan cara atau teknik penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Penelitian lapangan meliputi:

1. Observasi, yaitu observasi dan kajian terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan penelitian.
2. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan untuk memperoleh informasi berupa data dan informasi tentang data penelitian.
3. Lakukan survei kuesioner dengan membagikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden.

4. Dokumen yaitu mengumpulkan data melalui studi buku, makalah, dan jurnal ilmiah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.2.5.2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah memperoleh data dari buku, majalah dan literatur lain serta internet yang berkaitan dengan penelitian

3.2.6. Prosedur Pengujian dan Instrumen Penelitian

3.2.6.1. Analisis Instrumen Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yang dilakukan melalui diskusi dan persentase tertentu dari responden. Untuk memperoleh data yang baik dalam arti yang dekat (obyektif), tentunya diperlukan alat atau alat ukur yang efektif dan andal (reliabel). Untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas alat atau alat ukur tersebut maka akan dihasilkan hasil yang obyektif sebelum alat tersebut digunakan.

3.2.6.2. Uji Validitas

Uji validitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur validitas angket. Jika pertanyaan dalam kuesioner dapat mengungkapkan apa yang akan diukur dengan karena itu, efektivitas adalah mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang kita buat benar-benar dapat mengukur pertanyaan yang ingin kita ukur. Jika tingkat signifikansi masing-masing indeks pertanyaan lebih kecil dari 0,05 berarti indeks pertanyaan efektif (Ghozali, 2009).

3.2.6.3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner, yang merupakan indikator variabel atau struktur. Dikatakan bahwa nilai Cronbach alpha dari variabel-variabel tersebut lebih besar dari 0,60 yang artinya instrumen tersebut dapat digunakan sebagai pengumpul data yang andal, yaitu apabila dilakukan pengukuran berulang maka koefisien relatif dari hasil pengukuran. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang akan mengukur angket (Ghozali, 2009).

3.2.6.4. Konversi Data

Data yang dikumpulkan melalui survei kuesioner adalah data dengan skala ordinal, sedangkan analisis dalam penelitian ini membutuhkan data skala interval. Dalam proses penambahan data ordinal ke data interval digunakan metode Continuous Interval (MSI) dengan menggunakan program SPSS dan MS.Excel.

3.2.6.5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Solgomorov Sminov Test*. Dasar pengambilan keputusan adalah

jika 2-tailed $> 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terjadi multikolinier atau tidak dan apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik yaitu model yang terbebas dari multikolinearitas. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dideteksi dengan (1) nilai R square (R^2) sangat tinggi, tetapi secara sendiri-sendiri regresi antara variabel-variabel independen dengan dependen variabel tidak signifikan. (2) korelasi antara variabel-variabel independen sangat tinggi diatas 0,80.

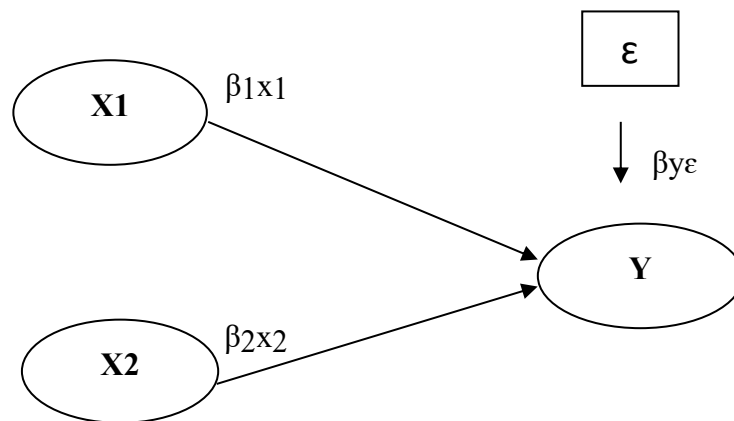
c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heterokedastisitas menggunakan uji Glejser. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya, jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:142).

3.2.7. Rancangan Uji Hipotesis

3.2.7.1. Model/Gambar

Untuk mengetahui sub variabel apakah latar belakang personal (X1) dan pengetahuan dewan tentang anggaran (X2) berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Y). Kemudian diuji dengan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur Analisis Regresi

Dari gambar di atas dapat dilihat dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y : Pengawasan keuangan oleh DPRD

X1 : Latar belakang personal

X2 : Pengetahuan dewan tentang anggaran

α : Konstanta

β_x : Koefisien Regres

ε : *Error*

3.2.7.2. Langkah-Langkah Pengujian Hipotesis

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan software SPSS dan MS.Excel for Windows, yang meliputi:

a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data dilihat dari mean, standar deviasi, variasi, maximum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2009).

b. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis linier berganda, yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel yang terpengaruh disebut variabel dependen atau variabel dependen, dan variabel yang terpengaruh disebut variabel independen atau variabel independen. Linieritas hanya dapat digunakan untuk regresi berganda karena memiliki variabel bebas berganda.

Jika model regresi berganda memenuhi persyaratan linieritas, seperti normalitas data (baik dalam model maupun dalam model) maka dapat dikatakan linier, jadi ada tidak perlu mengikuti Asumsi klasiknya adalah statistik multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika model

regresi linier berganda memenuhi asumsi normalitas data dan tidak memiliki asumsi statistik klasik, maka model tersebut dianggap baik.

c. Uji Hipotesis

1. Uji Statistik F

Pengujian bertujuan untuk membuktikan apakah variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara bersamaan (secara umum) (Ghozali, 2009).

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, tolak H_0 dan terima H_a yang berarti variabel independen menggunakan taraf signifikansi variabel dependen, dan taraf signifikansi 5%. Jika $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ secara Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, tolak H_0 dan terima H_a yang berarti variabel independen menggunakan taraf signifikansi variabel dependen, dan taraf signifikansi 5%. Jika $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ secara bersama-sama maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

2. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan besarnya pengaruh suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2009). Uji t juga dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi t. Menggunakan SPSS, regresi setiap variabel yang termasuk dalam output. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 (untuk taraf signifikansi 5%) maka variabel independen tidak berpengaruh masing-masing terhadap variabel dependen. Sedangkan

jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen masing-masing.

3. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Saat menguji hipotesis pertama, koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R Square (R^2) untuk mengetahui sejauh mana variabel independen bersifat transparan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan penyaluran dana desa. Interval nilai R^2 adalah antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 besar (mendekati 1), artinya variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, (Ghozali, 2009). Seperti yang dapat dilihat dari nilai adjusted R-squared, koefisien determinasi untuk pengujian hipotesis kedua.

Kerugian mendasar menggunakan R^2 adalah jumlah variabel independen yang disertakan dalam model menguntungkan. Untuk setiap variabel independen tambahan, R^2 harus meningkat, terlepas dari apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berbeda dengan R^2 , jika variabel independen ditambahkan ke model, nilai R-squared dapat dinaikkan atau diturunkan setelah dilakukan penyesuaian (Ghozali, 2009). Oleh karena

itu, saat mengevaluasi model regresi linier berganda, "R-kuadrat yang disesuaikan" akan digunakan.

3.2.7.3 Sistem Pengolahan Data Dengan Komputer

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan perangkat komputer untuk mengolah data dengan bantuan program MS melalui program SPSS 24 versi unggul.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Berdirinya Kantor DPRD Kabupaten Boalemo

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014.

4.1.2. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Boalemo

Visi: Terwujudnya Pelayanan Prima Bagi Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD.

Misi:

- 1) Mengoptimalkan mutu pelayanan publikasi, administrasi, keuangan dan fasilitasi kegiatan DPRD yang akuntabel, efektif dan efisien.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pimpinan DPRD Kabupaten Boalemo.

- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sekretariat dan peningkatan kemampuan kompetensi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Boalemo.
- 4) Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Boalemo.

4.1.3. Profil DPRD Kabupaten Boalemo

4.1.3.1. Pimpinan DPRD Kabupaten Boalemo

Pimpinan DPRD Kabupaten Boalemo terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan, terdiri atas :

1. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo adalah Bapak H. Karyawan Eka Puta Noho, S.Sos berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (P-DIP).
2. Wakil Ketua 1 adalah Bapak H. Lahmudin Hambali, S.Sos, M.Si berasal dari Partai Golongan Karya (GOLKAR).
3. Wakil Ketua II adalah Bapak Muslimin Harun berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

4.1.3.2. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Boalemo

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Boalemo periode 2019 – 2024 yaitu Partai GERINDRA berjumlah 3 kursi, Partai PDI-P berjumlah 7 kursi, Partai GOLKAR berjumlah 4 kursi, Partai NasDem berjumlah 2 kursi, Partai

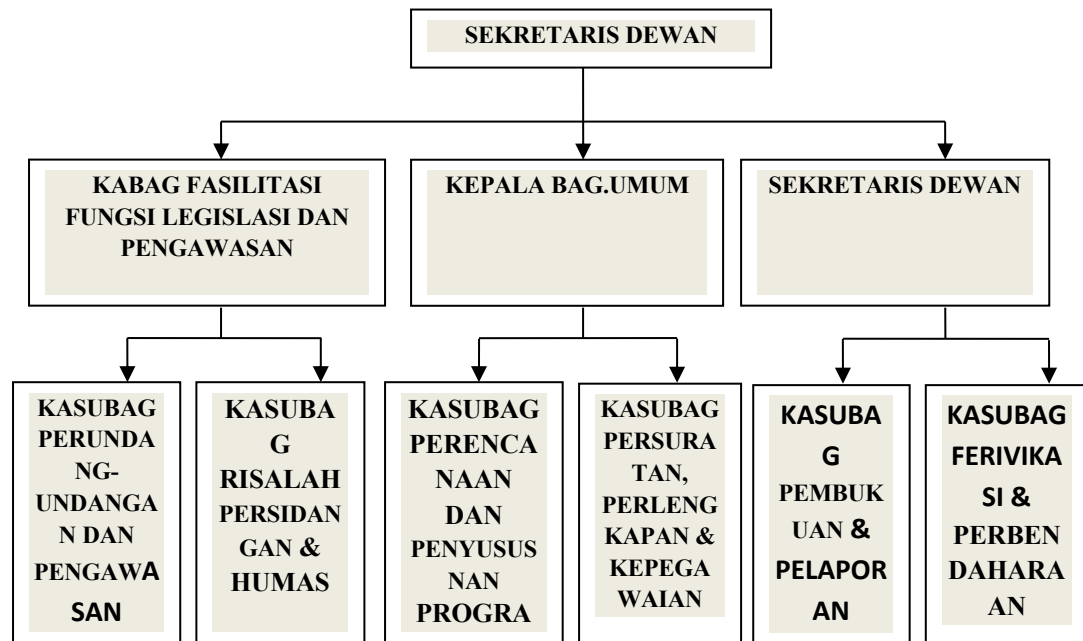
PKS berjumlah 1 kursi, Partai Perimdo berjumlah 1 kursi, Partai PPP berjumlah 2 kursi, Partai PAN berjumlah 1 kursi, Partai HANURA berjumlah 1 kursi, dan Partai Demokrat berjumlah 3 kursi. Jadi jumlah Keseluruhan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo adalah 25 orang yang terdiri dari 10 politik.

4.1.3.3. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo

Pemilihan anggota DPRD kabupaten Boalemo dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (Dapil) sebagai berikut :

1. Boalemo 1 wilayah dapilnya adalah Kecamatan Botumoito, Kecamatan Mananggu dan Kecamatan Tilamuta yang berjumlah 10 kursi.
2. Boalemo 2 wilayah dapilnya adalah Kecamatan Dulupi dan Kecamatan Wonosari yang berjumlah 8 kursi.
3. Boalemo 3 wilayah dapilnya adalah Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai yang berjumlah 7 kursi.

4.1.4. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo



Gambar 4.1

Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Boalemo

4.1.5. Tugas Pokok Anggota DPRD Kabupaten Boalemo

Tugas pokok anggota DPRD Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4. Mungusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.

5. Memilih wakil Bupati dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati.
6. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
8. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.2.1.1. Gambaran Umum Responden

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang berjumlah 25 orang dan akan digunakan sampel adalah seluruh anggota DPRD tersebut. Data Penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk kuesioner dan disebarkan langsung kepada seluruh narasumber atau anggota DPRD terkait dan diambil kembali 3-5 hari setelah pengiriman kuesioner.

Distribusi mengenai penyebaran kuesioner disajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentasi
Total kuesioner yang disebar	25	100%
Jumlah Kuesioner yang kembali	25	100%
Kuesioner yang dapat digunakan	25	100%

Sumber : Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 25 sampel eksemplar (100%) kuesioner disebarkan pada 25 anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang berjumlah 3 komisi diantaranya Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3. Terkumpul 25 Eksemplar atau 100% kuesioner yang telah kembali.

4.2.1.2. Karakteristik Responden

Sumber data adalah anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang meliputi Ketua DPRD, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua II dan anggota DPRD. Gambaran umum responden dibagi berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhir responden.

a) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2.
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	20	80 %
2	Perempuan	5	20 %
3	Jumlah	25	100 %

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 25 responden yang merupakan anggota DPRD kbaupaten Boalemo yang terdiri dari 20 anggota DPRD atau 80% berjenis kelamin laki-laki sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 5 anggota DPRD atau sebanyak 20%.

b) Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir responden

Tabel 4.3.

Pendidikan Terakhir Responden

No	Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	SMA	9	36%
2	D3	1	4%
3	S1	10	40%
4	S2	4	16%
5	S3	1	4%
6	Jumlah	25	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Tabel 4.3 menunjukan bahwa sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang disurvei berpendidikan S1 berjumlah 10 orang atau 40% dari total keseluruhan, berpendidikan SMA berjumlah 9 orang atau 36% dari total keseluruhan, berpendidikan D3 berjumlah 1 orang atau 4% dari total keseluruhan, berpendidikan S2 berjumlah 4 orang atau 16% dari total keseluruhan, dan berpendidikan S3 berjumlah 1 orang atau 4% dari total keseluruhan.

4.3. Hasil Instrumen Penelitian

4.3.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Semua variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan variabel pengawasan keuangan daerah (Y). Pertama, bobot item instrumen berbasis variabel dideskripsikan dengan menghitung frekuensi dan skor berdasarkan bobot opsi jawaban. Frekuensi dihitung dengan menghitung jumlah bobot yang dipilih, dan skor dihitung dengan mengalikan bobot opsi dengan frekuensi. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot terendah} \times \text{Item} \times \text{Jumlah responden} : 1 \times 1 \times 25 = 25$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{Item} \times \text{Jumlah responden} : 5 \times 1 \times 25 = 125$$

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentan skala penelitian sebagai berikut :

$$\text{Rentang skalanya yaitu: } \frac{125-25}{5} = 20$$

Tabel 4.4

Skala Penelitian Jawaban Responden

No	Rentang	Kategori
1	25-45	Sangat rendah
2	46-66	Rendah
3	67-87	Sedang
4	88-108	Tinggi
5	109-125	Sangat Tinggi

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

1. *Personal Background (X1)*

Hasil tanggapan responden variabel Personal Background (X1) berdasarkan tabulasi dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden

diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari Personal Background (X1)

menurut tanggapan responden dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.5

Tanggapan responden mengenai *Personal Background* (X1)

Bobot Kategori Responden	Pertanyaan 1			Pertanyaan 2			Pertanyaan 3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	13	52	52,0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	11	33	44,0	8	24	32,0
2	11	22	44,0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	4,0	14	14	56,0	17	17	68,0
Jumlah	25	75	100	25	47	100	25	41	100
Keterangan	Sedang			Rendah			Sangat rendah		

Bobot Kategori Responden	Pertanyaan 4			Pertanyaan 5			Pertanyaan 6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10	30	40,0	11	33	44,0	7	21	28,0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	15	15	60,0	14	14	56,0	18	18	72,0
Jumlah	25	45	100	25	47	100	25	39	100
Keterangan	Sangat rendah			Rendah			Sangat rendah		

Bobot Kategori Responden	Pertanyaan 7			Pertanyaan 8			Pertanyaan 9		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%

5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	11	33	44,0	7	21	28,0	5	15	20,0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	14	14	56,0	18	18	72,0	20	20	80,0
Jumlah	25	47	100	25	39	100	25	35	100
Keterangan	Rendah			Sangat rendah			Sangat rendah		

Bobot Kategori Responden	Pertanyaan 10		
	F	Skor	%
5	0	0	0
4	6	24	24,0
3	17	51	68,0
2	0	0	0
1	2	2	8,0
Jumlah	25	77	100
Keterangan	Sedang		

Sumber : Data yang diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa dari 25 orang responden yang diteliti secara persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel *Personal Background* (X1) adalah kategori sangat rendah terdapat pada item nomor 3,4,6,8,9 kategori rendah pada item nomor 2,5,7 dan kategori sedang terdapat pada item nomor 1 dan 10. Hal ini menunjukkan bahwa dari jawaban responden didominasi oleh kategori sangat rendah maka responden kurang setuju bahwa *personal background* dari masing-

masing anggota DPRD berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota DPRD Kabupaten boalemo.

2. Pemahaman Regulasi

Pemahaman regulasi (X2) terdiri atas 5 item pertanyaan berdasarkan tabulasi data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai masing-masing indikator dari pemahaman regulasi (X2). Menurut tanggapan responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6

Tanggapan responden mengenai pemahaman regulasi (X2)

Bobot Kategori Responden	Pertanyaan 1			Pertanyaan 2			Pertanyaan 3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	12	36	48,0	9	27	36,0	14	42	56,0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	13	13	52,0	16	16	64,0	11	11	44,0
Jumlah	25	49	100	25	43	100	25	53	100
Keterangan	Rendah			Sangat Rendah			Rendah		

Bobot Kategori Responden	Pertanyaan 4			Pertanyaan 5		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
3	9	27	36,0	13	39	
2	0	0	0	0	0	0

1	16	16	64,0	12	12	
Jumlah	25	43	100	25	51	100
Keterangan	Sangat rendah			Rendah		

Sumber : Data yang diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa dari 25 orang responden yang diteliti secara persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel *Personal Background* (X1) adalah kategori sangat rendah terdapat pada item nomor 2,4 dan kategori rendah pada item nomor 1,3,5. Hal ini menunjukan reponden kurang setuju bahwa pemahaman regulasi masih belum benar-benar dilaksanakan dengan baik di Kantor DPRD Kabupaten Boalemo.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah di DPRD Kabupaten Boalemo mencakup 9 item pertanyaan. Berdasarkan jawaban responden, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7

Tanggapan responden mengenai Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Bobot Kategori Responden	Pertanyaan 1			Pertanyaan 2			Pertanyaan 3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	11	33	44,0	9	27	36,0	13	39	52,0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	14	14	56,0	16	16	64,0	12	12	48,0
Jumlah	25	47	100	25	43	100	25	51	100
Keterangan	Rendah			Sangat Rendah			Rendah		

Bobot Kategori Responden	Pertanyaan 4			Pertanyaan 5			Pertanyaan 6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	7	28	28,0	0	0	0
3	15	45	60,0	16	48	64,0	10	30	40,0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	10	10	40,0	2	2	8,0	15	15	60,0
Jumlah	25	55	100	25	78	100	25	45	100
Keterangan	Rendah			Sedang			Sangat Rendah		

Bobot Kategori Responden	Pertanyaan 7			Pertanyaan 8			Pertanyaan 9		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	13	39	52,0	10	30	40,0	12	36	48,0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	12	12	48,0	15	15	60,0	13	13	52,0
Jumlah	25	51	100	25	45	100	25	49	100
Keterangan	Rendah			Sangat Rendah			Rendah		

Sumber : Data yang diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 25 orang responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel pengawasan keuangan daerah (Y) umumnya dikategorikan sangat rendah pada pernyataan 2,6,8, kategori rendah pada pernyataan 1,3,4,7,9 dan kategori sedang pada pernyataan 5 . hal ini menunjukkan bahwa jawaban dari

responden di dominasi oleh kategori rendah maka responden kurang setuju tentang pengawasan keuangan daerah yang telah dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Boalemo.

4.3.2. Hasil Uji Kualitas Data

4.3.2.1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur validitas kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi personel untuk memeriksa korelasi antara skor butir dengan skor total masing-masing variabel. Jika tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05, item pernyataan tersebut valid.

Hasil uji validitas ketiga variabel tersebut antara lain *personal background*, pemahaman regulasi anggota DPRD dan pengawasan keuangan daerah. Tabel berikut mencantumkan hasil uji validitas masing-masing variabel penelitian.

1. Variabel *Personal Background*

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas *Personal Background* (X1)

Item Kuesioner	Koefisien Korelasi	Sig (2-Tailed)	Alpha	Keterangan
K-X1.1	0.575	0.003	0.05	Valid
K-X1.2	0.723	0.000	0.05	Valid
K-X1.3	0.831	0.000	0.05	Valid
K-X1.4	0.813	0.000	0.05	Valid

K-X1.5	0.647	0.000	0.05	Valid
K-X1.6	0.895	0.000	0.05	Valid
K-X1.7	0.793	0.000	0.05	Valid
K-X1.8	0.939	0.000	0.05	Valid
K-X1.9	0.869	0.000	0.05	Valid
K-X1.10	0.773	0.000	0.05	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel “*Personal Background*” lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item yang dikemukakan dalam penelitian ini valid.

2. Variabel Pemahaman Regulasi (X2)

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Pemahaman Regulasi (X2)

Item Kuesioner	Koefisien Korelasi	Sig (2-Tailed)	Alpha	Keterangan
K-X2.1	0.860	0.000	0.05	Valid
K-X2.2	0.890	0.000	0.05	Valid
K-X2.3	0.843	0.000	0.05	Valid
K-X2.4	0.851	0.000	0.05	Valid
K-X2.5	0.849	0.000	0.05	Valid

Sumber : Data yang diolah 2022

Dapat dilihat dari Tabel 4.9 bahwa nilai signifikansi variabel pemahaman regulasi lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan item pernyataan dalam penelitian valid.

3. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Item Kuesioner	Koefisien Korelasi	Sig (2-Tailed)	Alpha	Keterangan
K-Y.1	0.870	0.000	0.05	Valid
K-Y.2	0.939	0.000	0.05	Valid
K-Y.3	0.828	0.000	0.05	Valid
K-Y.4	0.806	0.000	0.05	Valid
K-Y.5	0.671	0.000	0.05	Valid
K-Y.6	0.943	0.000	0.05	Valid
K-Y.7	0.890	0.000	0.05	Valid
K-Y.8	0.923	0.000	0.05	Valid
K-Y.9	0.888	0.000	0.05	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.10, nilai signifikansi semua variabel pengawasan keuangan daerah yang diketahui lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dalam penelitian ini efektif.

4.3.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur reliabilitas suatu alat ukur dengan memberikan skor yang relatif sama kepada responden, meskipun responden menilai pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas instrumen hanya dilakukan pada item valid yang diketahui dalam uji validitas instrumen. Uji Cronbach Alpha digunakan untuk menguji tingkat reliabilitas masing-masing variabel. Apabila nilai Cronbach Alpha yang mendekati 1 menunjukkan bahwa konsistensi reliabilitas semakin tinggi. Tabel berikut menggambarkan hasil uji

reliabilitas item pernyataan dari masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan Cronbach Alpha:

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas Variabel Bebas dan Variabel Terikat

No	Variabel	Koefisien Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
1	<i>Personal Background</i> (X1)	0.780	0.60	Reliabel
2	Pemahaman regulasi (X2)	0.819	0.60	Reliabel
3	Pengawasan keuangan daerah (Y)	0.792	0.60	Reliabel

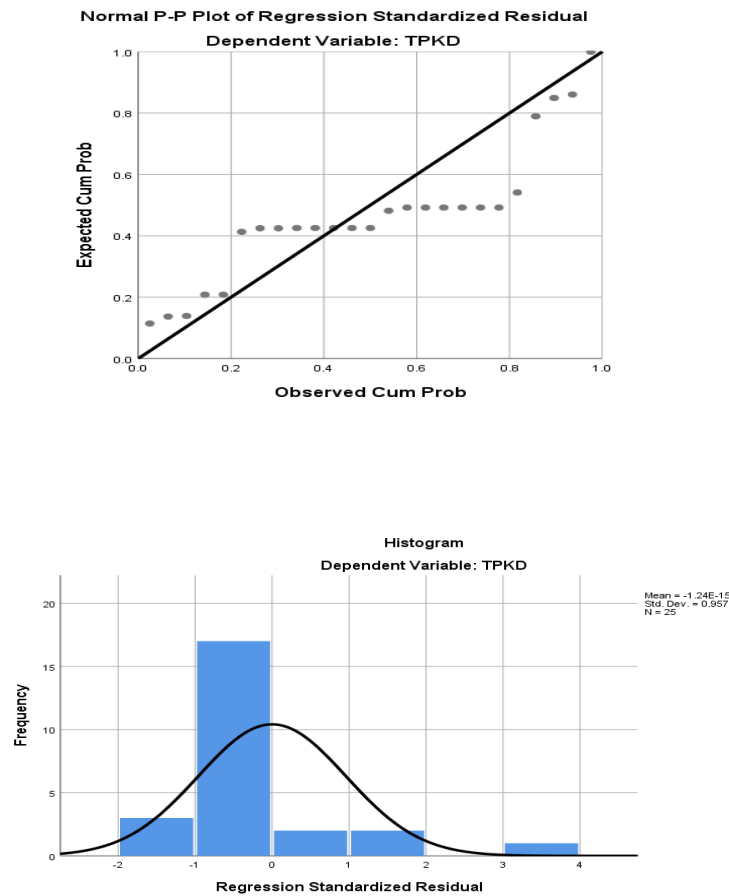
Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Tabel 4.11 menunjukan nilai Cronbach Alpha untuk variabel *Personal Background*, pemahaman regulasi dan pengawasan keuangan daerah lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukan bahwa butir-butir dalam penelitian ini reliabel. Dengan cara ini setiap butir kalimat yang digunakan akan dapat memperoleh data yang konsisten, dan jika kalimat tersebut disampaikan kembali maka jawabannya akan relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan hasil dalam model regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, plot P-P normal dari plot residual standar regresi digunakan untuk menguji normalitas data. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat titik-titik tersebar disekitar diagonal dan arah sebaran mengikuti arah diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak karena memenuhi asumsi normalitas.

2) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIP) kurang dari 10 (Ghozali : 2013). Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas

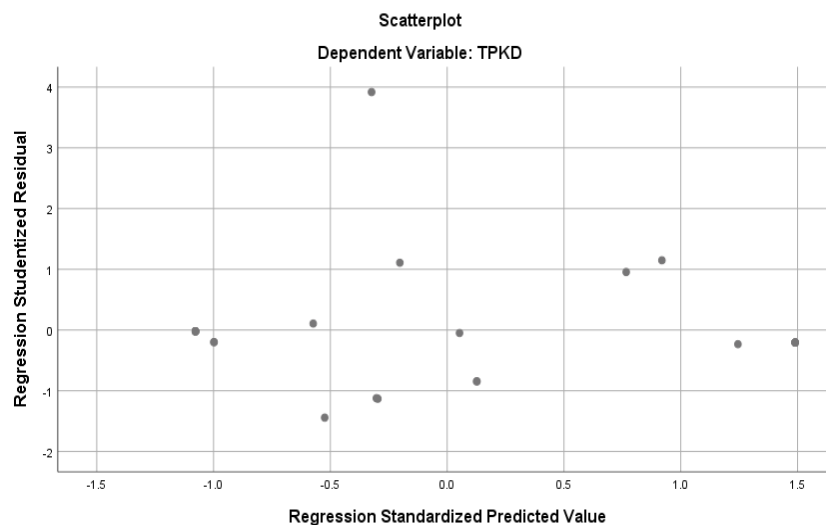
Coefficients^a			
Model		Correlations	
		Tolerance	VIF
1	<i>Personal Background</i>	.517	1.935
	Pemahaman Regulasi	.517	1.935
Dependent Variabel : Pengawasan Keuangan Daerah			

Sumber : Data Primer yang diolah 2022

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil uji multikolinieritas dari masing-masing variabel independen menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIP) memiliki nilai tidak lebih dari 10 dan ditinjau dari nilai *Tolerance* memiliki nilai tidak kurang dari 0,1. Artinya tidak terdapat multikolinieritas dalam model persamaan regresi, sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali : 2013). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot. Tes tersebut ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa terlihat titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka Nol (0) pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastitas dalam regresi.

4.4. Hasil Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah hasil pengujian hipotesis klasik dan hasil keseluruhan menunjukkan bahwa model regresi memenuhi hipotesis klasik, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi model regresi berganda.

Tabel 4.13

Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.557	1.752		.318	.754
	<i>Personal Background</i>	.286	.122	.283	2.341	.029

	Pemahaman Regulasi	1.264	.221	.693	5.723	.000
a. Dependent Variabel : Pengawasan Keuangan Daerah						

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabl 4.13, persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 0,557 + 0,286X_1 + 1.264X_2$$

Model tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 0,557 yang artinya jika variabel bebas (*Personal Background* dan Pemahaman Regulasi) adalah 0 maka nilai variabel terikat (pengawasan keuangan daerah) akan turun sebesar 0,557.
- b. Koefisien regresi *Personal Background* (X1) sebesar 0,286 yang menunjukkan bahwa variabel *Personal Background* (X1) berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.
- c. Koefisien regresi (X2) pemahaman regulasi adalah 1,264 searah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah antara variabel pemahaman regulasi (X2) dengan variabel pengawasan keuangan daerah (Y). Semakin tinggi pemahaman anggota dewan mengenai regulasi maka semakin baik pengawasan keuangan daerah tersebut.

2) Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4.14

Hasil Uji R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.913 ^a	.833	.818	2.691

Sumber : Data yang diolah 2022

a. Precditors : (Constant), *Personal Background*, dan Pemahaman Regulasi

b. Dependent Variabel : Pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan tabel 4.14 diatas bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,913 yang menunjukkan bahwa kuat hubungan antara variabel independen (*Personal Background* dan Pemahaman Regulasi) terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (Y). Sedangkan nilai R-squared sebesar 0,833 atau 83,3% yang menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel *Personal Background* dan Pemahaman Regulasi sebesar 83,3% sedangkan sisanya 16,7% dapat dijelaskan.

3) Uji secara simultan (Uji F)

Pengujian ini menunjukkan apakah semua variabel bebas secara bersama –sama (simultan) mempengaruhi varibel terikat secara signifikan. Kriteria pengujian *P Value* (Sig) < 0,05 maka *Ho ditolak* sedangkan jika *P Value* (Sig) > 0,05 maka *Ho diterima*. Hasil uji F adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	796.687	2	398.343	55.025	.000 ^b

	Residual	159.266	22	7.239		
	Total	955.953	24			

Sumber : Data yang diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas jika menunjukkan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka dapat dibandingkan bahwa signifikan $< \alpha$ atau $0,000 < 0,05$ yang berarti secara simultan pengaruh semua variabel independen signifikan secara statistik terhadap pengawasan keuangan daerah. Diketahui bahwa nilai F adalah 55,025, sehingga secara simultan semua variabel independen berpengaruh secara statistik terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini membuktikan **hipotesis pertama diterima**. Hal ini berarti *Personal background* dan pemahaman anggota dewan tentang regulasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah di Kantor DPRD Kabupaten Boalemo.

4) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (t-test) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji T, hasil pengujian statistik, untuk variabel *personal background* (X1), pemahan regulasi (X2), dan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). dengan membandingkan kriteria pengujian jika *P Value* (Sig) $< 0,05$ maka *Ho ditolak* sedangkan *P Value* (Sig) $> 0,05$ maka *Ho diterima*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel *personal background* adalah 0,029 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya **hipotesis kedua diterima**, sehingga dapat dikatakan *personal background* berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Nilai t sebesar 2,341 menunjukkan bahwa pengaruh terhadap variabel terikat bertanda positif.
- b. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Pemahaman Regulasi Anggota DPRD sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemahaman regulasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu hipotesis ini sesuai dengan hasil penelitian sehingga **hipotesis ketiga diterima**.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS dan Microsoft Excel dapat diketahui bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan pengujian signifikansi adalah signifikansi. Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan di bawah ini:

1. ***Personal background* (X1) dan pemahaman anggota dewan tentang regulasi (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y)**

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa kontribusi variabel *personal background* (X1) dan pemahaman anggota dewan tentang regulasi (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) pada kantor DPRD Kabupaten Boalemo. 83,5% dan sisanya 16,5%. Besarnya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa *personal background* dan pemahaman regulasi merupakan dua hal yang harus dipahami oleh anggota DPRD dan pengawasan keuangan daerah yang baik dapat dibentuk untuk mengawasi penggunaan keuangan di daerah. Nilai R sebesar 0,913 yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengawasan keuangan daerah dengan kedua variabel dependent tersebut sangat kuat. Sedangkan nilai R-squared sebesar 0,833 atau 83,3% yang menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel *Personal Background* dan Pemahaman Regulasi sebesar 83,3% sedangkan sisanya 16,7% dapat dijelaskan.

Hal ini sependapat dengan penelitian Sherly Dwi Cipta, Zul Amar, Rina Andriani (2020) yang menyatakan bahwa *Personal Background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

2. *Personal Background* (X1) Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Hasil analisis uji t terhadap hipotesis pertama (H_1) dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi variabel *personal background* sebesar 0,286 serta besarnya t hitung dari variabel *personal background* sebesar 2,341 dengan nilai signifikan 0,029. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05 (5%) maka H_1

diterima. Jadi, dapat disimpulkan *personal background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Artinya, semakin baik *personal background* yang dimiliki anggota dewan maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan juga semakin meningkat.

Pada penelitian ini, *personal background* dari anggota dewan Kabupaten Boalemo cukup baik. *Personal background* yang baik diukur dengan beberapa indikator antara lain latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman di DPRD, dan pelatihan tentang keuangan daerah. Dengan *personal background* yang baik maka anggota DPRD dapat melaksanakan tugasnya dalam mengawasi keuangan daerah secara lebih maksimal.

Pengaruh latar belakang individu dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah apabila latar belakang yang dimiliki oleh anggota DPRD itu sesuai dengan pekerjaan yang digeluti, maka perannya dalam pengawasan keuangan daerah akan terlaksana dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Winarna dan Murni (2007) bahwa latar belakang individu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak roda organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Dengan mengetahui lebih dalam latar belakang individu anggota dewan akan membantu menilai kinerja para anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2014) dan Sherly Dwi Cipta, Zul Amar, Rina Andriani (2020) yang menyimpulkan bahwa latar belakang anggota dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) *Personal background* berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. Sumber daya manusia yang baik dapat menunjang kinerja anggota dewan sehingga lebih maksimal dalam mendeteksi kecurangan anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa *personal background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

3. Pemahaman Regulasi (X2) Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil analisis pada uji t terhadap hipotesis kedua (H_2) dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai nilai koefisien korelasi sebesar 1,286 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Dengan demikian pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh DPRD kabupaten Boalemo. Karena adanya regulasi tentang keuangan daerah yang ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah.

Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Anggota DPRD yang memiliki

pemahaman regulasi yang baik mengenai keuangan daerah akan mudah mengawasi apakah APBD telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak dan mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran. Apabila anggota DPRD sendiri tidak memahami tentang peraturan, lalu bagaimana caranya anggota DPRD tersebut dapat menjalankan perannya sebagai pengawas keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kartikasari (2012) bahwa pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah. Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Kartikasari (2012) yang menyimpulkan bahwa pemahaman regulasi anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. *Personal Background* dan pemahaman regulasi mempengaruhi 83,3% pengawasan keuangan daerah oleh anggota DPRD Kabupaten Boalemo. Besarnya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa *personal background* dan pemahaman regulasi merupakan dua yang harus dimiliki oleh anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah, dan pengawasan keuangan yang baik dapat dibentuk untuk mengawasi keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan pertanggungjawaban dan lain-lain berjalan dengan baik.
- b. Tingkat signifikansi variabel *personal background* adalah 0,029 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa latar belakang pribadi yang baik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Nilai t sebesar 2,341 menunjukkan bahwa pengaruh terhadap variabel terikat bertanda positif.
- c. Tingkat signifikansi variabel pemahaman regulasi adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemahaman regulasi oleh anggota DPRD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian tentang Pengaruh *Personal Background* dan Pemahaman Regulasi Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di DPRD Kabupaten Boalemo, saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk anggota dewan sebaiknya menjalankan fungsi dan tugasnya dengan maksimal sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan Pemerintahan daerah dapat berjalan lancar jika didukung oleh pengawasan keuangan daerah.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang secara signifikan dapat mempengaruhi variabel pengawasan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalaludin Sayuti. (2013). *Manajemen Kantor Praktis*. Bandung : Alfabeta.
- Arfan Ikhsan. (2013). *Teori Akuntansi*. Bandung : Cita Pustaka Media.
- Dewi, Kartika Sari. (2012). *Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Boyolali)*. *Accounting Analysis Journal*, 1 (1). <https://doi.org/10.15294/aa.v1i.336>. Universitas Negeri Semarang.
- Fahmi, Irham (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Undip.
- Haryani, R. (2011). *Pengaruh Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan (APBD) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan public (Studi Kasus di DPRD Provinsi Sumatera Utara)*. Universitas Sumatera, Medan.
- Kuswandi, Aos. (2016). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Bekasi : Badan Penerbitan Universitas Islam '45' (UNISMA).
- Paramita dan Andriyani. (2010). *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) Studi Empiris pada DPRD Se-Keresidenan Kedu*. Purwokerto : Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Relawati, Rahayu. (2012). *Dasar Manajemen*. Malang : Universitas Muhamadyah Malang.
- Roslina. (2012). *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Universitas Islam Indragiri Tembilahan.
- Sigit, Arie Wibowo. (2012). *Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Political Culture Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixmethods)*. Bandung: Alfabeta
- Siti Amalia. (2015). *ALAT ANALISIS DATA-Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*, Edisi 1,CV.Andi Offset, Yogyakarta.
- Utami, Sofyan. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Parsipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Jurnal WRA, Vol 1, 1 April 2013.
- Wibowo. (2012). *Manajemen Kinerja (Edisi ke 3)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wikipedia. (2017). *Wikipedia museum*. <https://id.wikipedia.org/wiki/museum>
- Winarna, Jaka dan Sri Murni. (2007). *Pengaruh Personal Background, Political Background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah*. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Witono, Banu. (2003). *Optimalisasi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 2 : 151-168.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang penyusunan APBD 2018.
- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

LAMPIRAN 1 : KUESIONER PENELITIAN

DATA KUESIONER

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Anggota DPRD Kab.Boalemo
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indrawati Makuta
NIM : E1118092
Jurusan : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Judul Penelitian : Pengaruh *Personal Background* dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian ini, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan program studi Akuntansi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, mohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan, dan kerahasiaan data yang diisi akan tetap dijaga.

Atas kerjasama yang baik dan kesanggupan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Tilamuta, 2022

Hormat Saya

INDRAWATI MAKUTA

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

- 1 Nama : (Boleh Tidak Diisi)
- 2 Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
- 3 Usia : Tahun
- 4 Tingkat Pendidikan : ☐ SMA/SMK ☐ D3 ☐ S1
☐ S2 ☐ S3
Lain-lain
- 5 Jabatan :
- 6 Pengalaman Kerja : Tahun
- 7 Komisi :

Petunjuk Pengisian

Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda silang pada kolom yang tersedia dan pilihlah sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang salah oleh karena itu, diharapkan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Penilaian

A	B	C	D	E
Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat tidak Setuju

QUESTIONER

A. *Personal Background (X₁)*

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Jenjang pendidikan berpengaruh pada bapak/ibu sebagai anggota DPRD mengenai pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo.					
2.	Latar belakang pendidikan Bapak/Ibu dapat membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.					
3.	Pengalaman organisasi berpengaruh signifikan pada bapak/ibu sebagai anggota DPRD mengenai pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo.					
4.	Pengalaman organisasi Bapak/Ibu mempengaruhi keahlian dalam melaksanakan tugas.					
5.	Semakin lama Bapak-Ibu mengikuti suatu organisasi, maka semakin banyak pengalaman yang di dapatkan.					
6.	Pengalaman di DPRD berpengaruh pada bapak/ibu sebagai anggota DPRD mengenai pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo.					
7.	Masa kerja Bapak/Ibu menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas.					
8.	Bapak/Ibu telah mengikuti berbagai pelatihan tentang keuangan daerah.					
9.	Pelatihan tentang keuangan daerah berpengaruh pada bapak/ibu sebagai anggota DPRD mengenai pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo.					
10.	Sertifikasi dari pelatihan keuangan daerah yang di peroleh Bapak/Ibu dapat mendukung dalam pelaksanaan Tugas.					

B. *Pemahaman Anggota DPRD terhadap regulasi (X₂)*

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	DPRD memiliki peran sangat penting dalam proses pembahasan dan penetapan regulasi tentang APBD.					

2.	DPRD memiliki fungsi pengawasan berupa pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh masing-masing OPD.					
3.	Dalam melakukan fungsinya, anggota dewan harus mematuhi tata tertib DPRD.					
4.	Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan regulasi tentang APBD, dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang disebut komisi.					
5.	Peraturan yang menjadi pembanding dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh OPD adalah peraturan Bupati lainnya.					

C. Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan daerah (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Bapak/Ibu anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat perencanaan dan penetapan kebijakan umum APBD.					
2.	Bapak/Ibu anggota dewan berperan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD.					
3.	Bapak/ibu anggota dewan ikut serta dalam pengesahan APBD.					
4.	Bapak/Ibu anggota dewan harus mengetahui dan dapat menjelaskan APBD yang telah disahkan.					
5.	Bapak/Ibu anggota dewan merasa pengesahan APBD sudah memenuhi asas transparansi.					
6.	Bapak/Ibu anggota dewan ikut serta memantau pelaksanaan APBD.					
7.	Bapak/Ibu anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap LPJ APBD yang disusun oleh eksekutif.					
8.	Bapak/Ibu anggota dewan meminta keterangan terkait LPJ APBD yang disampaikan oleh eksekutif.					
9.	Bapak/Ibu anggota dewan mengusut dan menindaklanjuti apabila terjadi kegagalan LPJ APBD					

LAMPIRAN 2: DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN

Frequency Table X1

PB1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	4.0	4.0	4.0
	2	11	44.0	44.0	48.0
	4	13	52.0	52.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PB2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	14	56.0	56.0	56.0
	3	11	44.0	44.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PB3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	17	68.0	68.0	68.0
	3	8	32.0	32.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PB4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	15	60.0	60.0	60.0
	3	10	40.0	40.0	100.0

	Total	25	100.0	100.0	
--	-------	----	-------	-------	--

PB5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	14	56.0	56.0	56.0
	3	11	44.0	44.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PB6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	18	72.0	72.0	72.0
	3	7	28.0	28.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PB7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	14	56.0	56.0	56.0
	3	11	44.0	44.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PB8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	18	72.0	72.0	72.0
	3	7	28.0	28.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PB9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	20	80.0	80.0	80.0
	3	5	20.0	20.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PB10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	8.0	8.0	8.0
	3	17	68.0	68.0	76.0
	4	6	24.0	24.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Frequency Table X2**P1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	13	52.0	52.0	52.0
	3	12	48.0	48.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	16	64.0	64.0	64.0
	3	9	36.0	36.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	11	44.0	44.0	44.0
	3	14	56.0	56.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

P4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	16	64.0	64.0	64.0
	3	9	36.0	36.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

P5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	12	48.0	48.0	48.0
	3	13	52.0	52.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Frequency Table Y**PKD1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	14	56.0	56.0	56.0
	3	11	44.0	44.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PKD2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	16	64.0	64.0	64.0
	3	9	36.0	36.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PKD3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	12	48.0	48.0	48.0
	3	13	52.0	52.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PKD4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10	40.0	40.0	40.0
	3	15	60.0	60.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PKD5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	8.0	8.0	8.0
	3	16	64.0	64.0	72.0
	4	7	28.0	28.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PKD6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	15	60.0	60.0	60.0
	3	10	40.0	40.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PKD7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	12	48.0	48.0	48.0
	3	13	52.0	52.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PKD8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	15	60.0	60.0	60.0
	3	10	40.0	40.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PKD9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	13	52.0	52.0	52.0
	3	12	48.0	48.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Lampiran 3: Uji Validitas dan Uji Realibilitas**Uji Validitas XI**

Correlations

		PB1	PB2	PB3	PB4	PB5	PB6	PB7	PB8
PB1	Pearson Correlation	1	.664**	.176	.316	.103	.410*	.244	.566**
	Sig. (2-tailed)		.000	.400	.124	.624	.042	.240	.003
	N	25	25	25	25	25	25	25	25
PB2	Pearson Correlation	.664**	1	.428*	.428*	.188	.524**	.513**	.704**
	Sig. (2-tailed)	.000		.033	.033	.367	.007	.009	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25
PB3	Pearson Correlation	.176	.428*	1	.840**	.601**	.718**	.774**	.718**
	Sig. (2-tailed)	.400	.033		.000	.001	.000	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25
PB4	Pearson Correlation	.316	.428*	.840**	1	.592**	.764**	.757**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.124	.033	.000		.002	.000	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25
PB5	Pearson Correlation	.103	.188	.601**	.592**	1	.704**	.513**	.524**
	Sig. (2-tailed)	.624	.367	.001	.002		.000	.009	.007
	N	25	25	25	25	25	25	25	25

PB6	Pearson Correlation	.410*	.524**	.718**	.764**	.704**	1	.704**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.042	.007	.000	.000	.000		.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25
PB7	Pearson Correlation	.244	.513**	.774**	.757**	.513**	.704**	1	.704**
	Sig. (2-tailed)	.240	.009	.000	.000	.009	.000		.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25
PB8	Pearson Correlation	.566**	.704**	.718**	.764**	.524**	.802**	.704**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000	.007	.000	.000	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25
PB9	Pearson Correlation	.454*	.564**	.729**	.612**	.564**	.802**	.564**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.023	.003	.000	.001	.003	.000	.003	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25
PB10	Pearson Correlation	.520**	.626**	.574**	.345	.326	.631**	.472*	.792**
	Sig. (2-tailed)	.008	.001	.003	.091	.112	.001	.017	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25
TPB	Pearson Correlation	.575**	.723**	.831**	.813**	.647**	.895**	.793**	.939**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25

Correlations

PB9	PB10	TPB
-----	------	-----

PB1	Pearson Correlation	.454*	.520**	.575**
	Sig. (2-tailed)	.023	.008	.003
	N	25	25	25
PB2	Pearson Correlation	.564**	.626**	.723**
	Sig. (2-tailed)	.003	.001	.000
	N	25	25	25
PB3	Pearson Correlation	.729**	.574**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000
	N	25	25	25
PB4	Pearson Correlation	.612**	.345	.813**
	Sig. (2-tailed)	.001	.091	.000
	N	25	25	25
PB5	Pearson Correlation	.564**	.326	.647**
	Sig. (2-tailed)	.003	.112	.000
	N	25	25	25
PB6	Pearson Correlation	.802**	.631**	.895**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000
	N	25	25	25
PB7	Pearson Correlation	.564**	.472*	.793**
	Sig. (2-tailed)	.003	.017	.000
	N	25	25	25
PB8	Pearson Correlation	.802**	.792**	.939**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	25	25	25
PB9	Pearson Correlation	1	.765**	.869**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	25	25	25
PB10	Pearson Correlation	.765**	1	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000

	N	25	25	25
TPB	Pearson Correlation	.869**	.773**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	25	25	25

Uji Validitas X2

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	TP
P1	Pearson Correlation	1	.781**	.690**	.614**	.603**	.860**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.001	.000
	N	25	25	25	25	25	25
P2	Pearson Correlation	.781**	1	.665**	.826**	.554**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.004	.000
	N	25	25	25	25	25	25
P3	Pearson Correlation	.690**	.665**	1	.497*	.761**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.012	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25
P4	Pearson Correlation	.614**	.826**	.497*	1	.721**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.012		.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25
P5	Pearson Correlation	.603**	.554**	.761**	.721**	1	.849**
	Sig. (2-tailed)	.001	.004	.000	.000		.000
	N	25	25	25	25	25	25
TP	Pearson Correlation	.860**	.890**	.843**	.851**	.849**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	25	25	25	25	25	25

Uji Validitas Y

Correlations

		PKD1	PKD2	PKD3	PKD4	PKD5	PKD6	PKD7
PKD1	Pearson Correlation	1	.846**	.529**	.724**	.680**	.757**	.852**
	Sig. (2-tailed)		.000	.007	.000	.000	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25
PKD2	Pearson Correlation	.846**	1	.721**	.612**	.760**	.919**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25
PKD3	Pearson Correlation	.529**	.721**	1	.686**	.329	.784**	.679**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000		.000	.109	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25
PKD4	Pearson Correlation	.724**	.612**	.686**	1	.279	.667**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.176	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25
PKD5	Pearson Correlation	.680**	.760**	.329	.279	1	.717**	.475*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.109	.176		.000	.016
	N	25	25	25	25	25	25	25
PKD6	Pearson Correlation	.757**	.919**	.784**	.667**	.717**	1	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	25	25	25	25	25	25	25
PKD7	Pearson Correlation	.852**	.721**	.679**	.850**	.475*	.784**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.016	.000	
	N	25	25	25	25	25	25	25

PKD8	Pearson Correlation	.757**	.919**	.784**	.667**	.568**	.833**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.003	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25
PKD9	Pearson Correlation	.600**	.781**	.923**	.784**	.356	.850**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.081	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25
TPKD	Pearson Correlation	.870**	.939**	.828**	.806**	.671**	.943**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25

Correlations

		PKD8	PKD9	TPKD
PKD1	Pearson Correlation	.757**	.600**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000
	N	25	25	25
PKD2	Pearson Correlation	.919**	.781**	.939**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	25	25	25
PKD3	Pearson Correlation	.784**	.923**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	25	25	25
PKD4	Pearson Correlation	.667**	.784**	.806**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	25	25	25
PKD5	Pearson Correlation	.568**	.356	.671**
	Sig. (2-tailed)	.003	.081	.000
	N	25	25	25
PKD6	Pearson Correlation	.833**	.850**	.943**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000

N		25	25	25
PKD7	Pearson Correlation	.784**	.763**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	25	25	25
PKD8	Pearson Correlation	1	.850**	.923**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	25	25	25
PKD9	Pearson Correlation	.850**	1	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	25	25	25
TPKD	Pearson Correlation	.923**	.888**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	25	25	25

Reliability

Scale: ALL VARIABLES X1

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	25	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	25	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.780	11

Scale: ALL VARIABLES X2

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	25	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	25	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.819	6

Scale : ALL VARIABLES Y

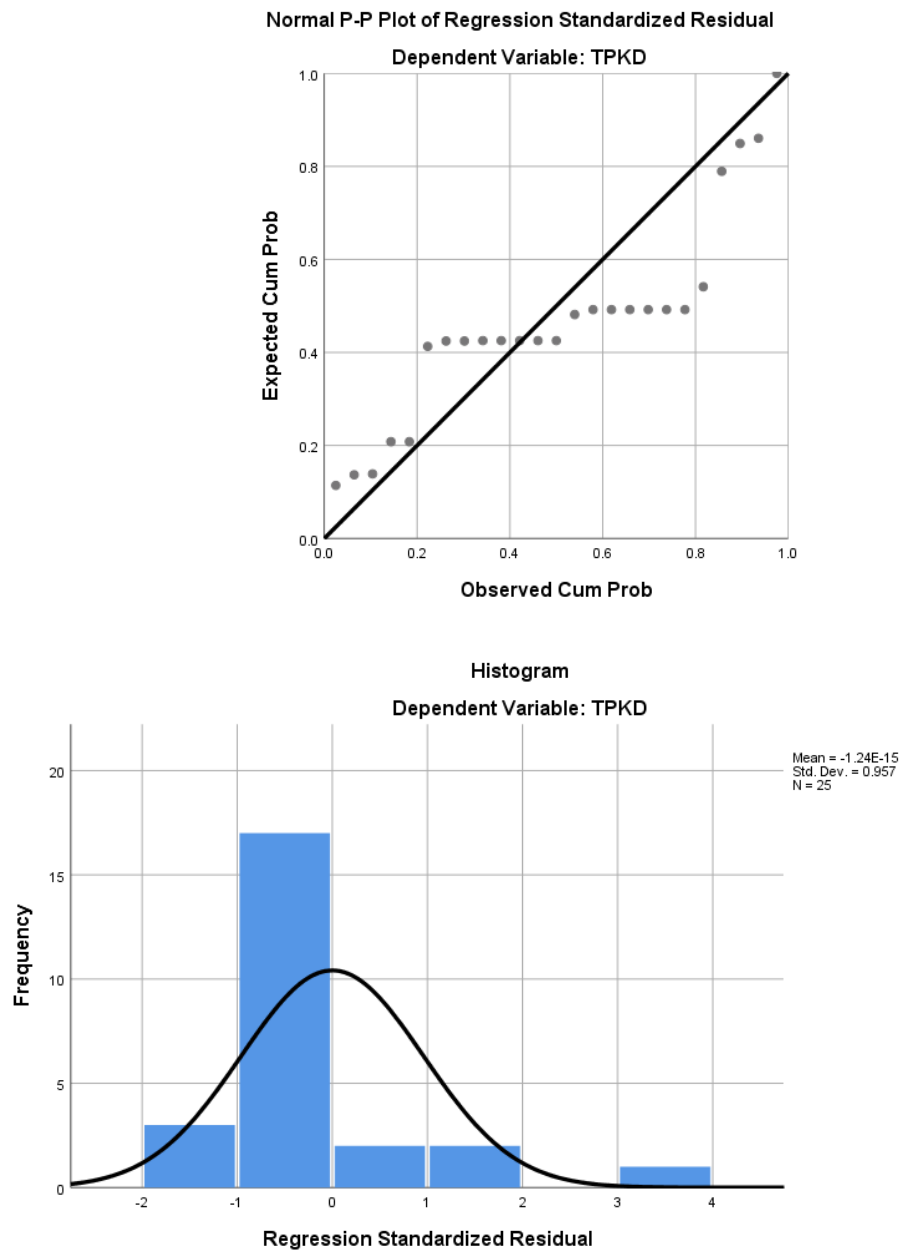
Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	25	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	25	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.792	10

Lampiran 4: Analisis Data dan Uji Hipotesis

Hasil Uji Normalitas

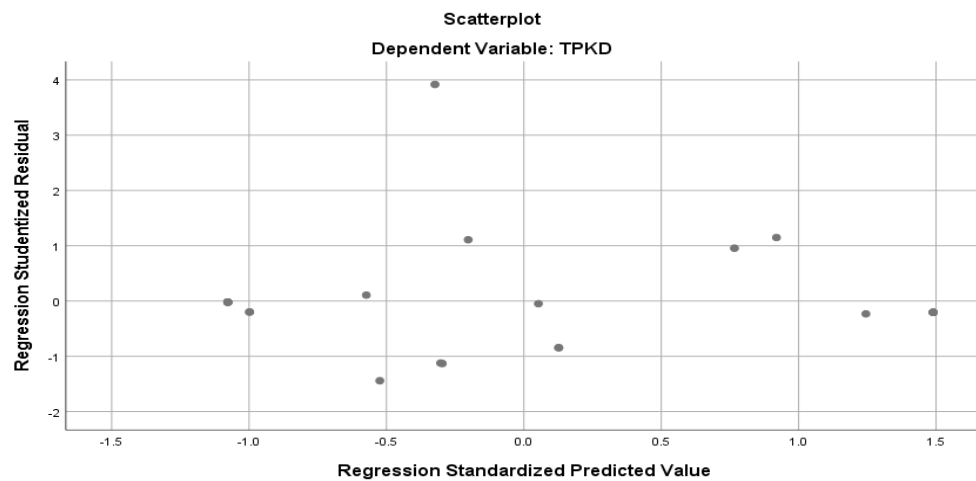


Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a					
Model		Correlations			
		Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)				
	TPB	.447	.204	.517	1.935
	TP	.773	.498	.517	1.935

a. Dependent Variable: TPKD

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlation
		B	Std. Error	Beta			Zero-order
1	(Constant)	.557	1.752		.318	.754	
	TPB	.286	.122	.283	2.341	.029	.765
	TP	1.264	.221	.693	5.723	.000	.890

Hasil Uji R²

Model Summary^b							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.913 ^a	.833	.818	2.691	.833	55.025	2

Model Summary^b			
Model	Change Statistics		
	df2	Sig. F Change	
1	22	.000	1.860
a. Predictors: (Constant), TP, TPB			
b. Dependent Variable: TPKD			

Hasil Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	796.687	2	398.343	55.025	.000 ^b
	Residual	159.266	22	7.239		
	Total	955.953	24			

Lampiran 5 : Tabulasi Data, Data Ordinal dan Konversi ke Internal

1. Personal Background (X1)

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5	5	4	4
5	5	5	5	4	4	5	5	4	5
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	5	5	4	5	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	4	4	4	3

Succesive Interval

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	TOTAL
3.921	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	16.141
2.445	1.000	1.000	1.000	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	14.665
3.921	2.601	2.643	2.610	2.601	2.670	2.601	2.670	2.750	4.154	29.219
2.445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	13.064
2.445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	13.064
2.445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	13.064
3.921	1.000	1.000	1.000	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	16.141
2.445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	13.064
3.921	2.601	2.643	2.610	2.601	2.670	2.601	2.670	2.750	4.154	29.219
3.921	2.601	1.000	2.610	2.601	2.670	2.601	2.670	1.000	2.620	24.292

3.921	2.601	2.643	2.610	1.000	1.000	2.601	2.670	1.000	4.154	24.199
2.445	1.000	1.000	1.000	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	14.665
3.921	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	16.141
3.921	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	2.601	1.000	1.000	2.620	17.742
2.445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	13.064
2.445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.601	1.000	1.000	2.620	14.665
2.445	1.000	2.643	2.610	2.601	2.670	2.601	1.000	1.000	2.620	21.189
3.921	2.601	2.643	2.610	2.601	2.670	2.601	2.670	2.750	4.154	29.219
2.445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	13.064
2.445	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	14.665
1.000	1.000	2.643	2.610	2.601	1.000	2.601	1.000	1.000	1.000	16.455
3.921	2.601	2.643	2.610	2.601	2.670	2.601	2.670	2.750	4.154	29.219
3.921	2.601	2.643	2.610	2.601	2.670	2.601	2.670	2.750	4.154	29.219
3.921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.620	14.540
3.921	1.000	1.000	2.610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.530

2. Pemahaman Regulasi (X2)

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
5	4	5	4	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	4	5	4	4
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
5	4	5	4	5
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	4	5	4	5
4	4	4	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5

4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	3	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	3	4	5	5	5

SuccessiveInterval									
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	TOTAL
2.601	1.000	1.000	2.610	2.565	1.000	2.596	1.000	1.000	15.371
1.000	1.000	1.000	1.000	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	10.565
2.601	2.624	2.596	2.610	4.061	2.610	2.596	2.610	2.596	24.903
1.000	1.000	1.000	1.000	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	10.565
1.000	1.000	1.000	1.000	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	10.565
1.000	1.000	1.000	1.000	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	10.565
1.000	1.000	2.596	2.610	1.000	1.000	1.000	1.000	2.596	13.802
1.000	1.000	1.000	1.000	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	10.565
2.601	2.624	2.596	2.610	4.061	2.610	2.596	2.610	2.596	24.903
2.601	2.624	2.596	2.610	2.565	2.610	2.596	2.610	2.596	23.407
1.000	1.000	1.000	1.000	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	10.565
1.000	1.000	1.000	1.000	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	10.565
2.601	1.000	1.000	2.610	2.565	1.000	2.596	1.000	1.000	15.371
2.601	2.624	2.596	2.610	4.061	2.610	2.596	2.610	2.596	24.903
1.000	1.000	1.000	1.000	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	10.565
2.601	2.624	2.596	2.610	2.565	2.610	2.596	2.610	2.596	23.407
2.601	2.624	2.596	2.610	4.061	2.610	2.596	2.610	2.596	24.903
2.601	2.624	2.596	2.610	4.061	2.610	2.596	2.610	2.596	24.903
1.000	1.000	1.000	1.000	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	10.565

1.000	1.000	1.000	2.610	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	12.174
1.000	1.000	2.596	2.610	2.565	2.610	2.596	1.000	2.596	18.573
2.601	2.624	2.596	2.610	4.061	2.610	2.596	2.610	2.596	24.903
2.601	2.624	2.596	2.610	4.061	2.610	2.596	2.610	2.596	24.903
1.000	1.000	2.596	1.000	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	12.161
1.000	1.000	2.596	2.610	1.000	1.000	2.596	2.610	2.596	17.008



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3786/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua DPRD Kabupaten Boalemo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Indrawati Makuta

NIM : E1118092

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : KANTOR DPRD KABUPATEN BOALEMO

Judul Penelitian : PENGARUH LATAR BELAKANG PERSONAL DAN
PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG
ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 23 Desember 2021

Ketua

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KANTOR KESBANG POL & LINMAS

Alamat : Jl. Sultan Hurudji Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

REKOMENDASI

Nomor : 070/KesbangPol/11/I/2022

Kepala Kantor Kesbang Pol Kabupaten Boalemo, setelah membaca Surat dari Ketua Lemlit Universitas Ichsan Gorontalo, Nomor : 3786/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2021 Tanggal 23 Desember 2021 perihal Permohonan Penelitian maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Indrawati Makuta
NIM : E1118092
Fak/Prodi : Ekonomi/Akuntansi
Alamat : Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
Judul Penelitian : "Pengaruh Latar Belakang Personal dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah"
Lokasi Penelitian : DPRD Kabupaten Boalemo
Waktu : 2 (Dua) Bulan Terhitung sejak tanggal 07 Februari s.d 07 April 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama mengadakan Penelitian agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Pemerintah setempat yang menjadi obyek penelitian.
2. Tidak dibenarkan menggunakan rekomendasi ini untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Penelitian.
3. Setelah melakukan Penelitian agar menyampaikan 1 eksemplar laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kab. Boalemo Cq. Kepala Kantor Kesbang PolKab. Boalemo
4. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali atau dinyatakan tidak berlaku apabila peneliti tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperutnya.

Tilamuta, 31 Januari 2022

A.n KEPALA KANTOR KESBANG POL
 KABUPATEN BOALEMO

KASIE POLITIK & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

(Signature)
SRI HASTUTY AMIR, SE
 NIP. 19781229 200701 2 008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Boalemo (Sebagai Laporan)
- ② Yth. Ketua Lemlit Unisan Gorontalo
3. Yth. Sekretaris DPRD Kab.Boalemo
4. Yang Bersangkutan
 Arsip



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

Alamat: Jalan Sis Aljufri Telp. (0443) 211174

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 135/KST/DPD/Boalemo/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris DPRD Kabupaten Boalemo:

Nama : **ROBERT PAUWENI, S.KM.,M.Si**
Nip : 197506062005011016
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Boalemo

Menerangkan Kepada:

Nama : **INDRAWATI MAKUTA**
Nim : E1118092
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa berdasarkan surat rekomendasi penelitian dari KESBANG POL dan LINMAS Nomor: 070/KesbangPol/11/1/2022 yang tertanggal 31 Januari 2022, maka dengan ini kami selaku Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo menerangkan kepada nama mahasiswa yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian di DPRD Kabupaten Boalemo dengan Judul Penelitian **"Pengaruh Personal Background dan Pemahaman Regulasi Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tilamuta, 23 Mei 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BOALEMO

ROBERT PAUWENI, S.KM.,M.Si

197506062005011016





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
 Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 186/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
 NIDN : 09281169010
 Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Indrawati Makuta
 NIM : E1118092
 Program Studi : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi
 Judul Skripsi : Pengaruh Personal Background Dan Pemahaman
 Regulasi Anggota DPRD Terhadap Pengawasan
 Keuangan Daerah (Studi Kasus DPRD Kabupaten
 Boalemo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 7%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

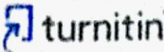
Mengetahui
 Dekan

DR. Musafir, SE., M.Si
 NIDN. 0928116901

Gorontalo, 23 Juni 2022
 Tim Verifikasi,


Muh. Sabir M. SE., M.Si
 NIDN. 0913088503

Tersampir :
 Hasil Pengecekan Turnitin

 **turnitin**

Similarity Report ID: oia.25211.17600903

● **7% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:


- 7% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	1%
	Internet	
2	Muhammad Beni, Dr. Zakaria Wahab, Hj. Marlina Widiyanti. "The Effect ...	<1%
	Crossref	
3	123dok.com	<1%
	Internet	
4	pt.scribd.com	<1%
	Internet	
5	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
6	ejournal.uniks.ac.id	<1%
	Internet	
7	suherminasep.blogspot.com	<1%
	Internet	
8	rjoas.com	<1%
	Internet	

Sources overview

 turnitin

Similarity Report ID: 61d25211:17600903

9	repository.upi.edu	Internet	<1%
10	id.scribd.com	Internet	<1%
11	fikom-unisan.ac.id	Internet	<1%
12	ejurnal.bunghatta.ac.id	Internet	<1%
13	text-id.123dok.com	Internet	<1%
14	palpres.com	Internet	<1%
15	core.ac.uk	Internet	<1%
16	lib.unnes.ac.id	Internet	<1%
17	smartaccounting.files.wordpress.com	Internet	<1%
18	scribd.com	Internet	<1%

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Indrawati Makuta
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Polohungo, 04 Agustus 1998
4. NIM : E1118092
5. Agama : Islam
6. Alamat : Ds.Polohungo, Kec.Dulupi, Kab.Boalemo
7. Email : indramakuta12345@gmail.com

B. Riwayat Hidup

1. SD : SDN 09 Dulupi Tahun 2011
2. SLTP Sederajat : SMPN 8 Dulupi Tahun 2014
3. SLTA : SMAN 1 Tilamuta Tahun 2017
4. Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas
Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi
2018-2022